

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PASLON DALAM PILKADA SERENTAK 2015

(STUDI DESKRIPTIF ANALISIS TENTANG KOMUNIKASI
POLITIK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DALAM UPAYA
MENJARING DUKUNGAN PUBLIK DI PROPINSI JAWA BARAT)

PARYATI SUDARMAN & DEWI SADIAH

Abstrak

Strategi komunikasi politik paslon dalam pemilihan umum, melahirkan pemimpin yang dijiwai semangat dan cita-cita kemerdekaan. Kandidat dituntut mampu meyakinkan publik. Masyarakat Indonesia cukup kritis dan faham terhadap kondisi kandidat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan hasil pilkada serentak 2015 di Propinsi Jawa Barat. Strategi komunikasi politik yang dilakukan para paslon dalam upaya menjaring dukungan publik dengan sampel di Kabupaten Bandung, Kabupaten Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pilkada serentak di Jawa Barat Tahun 2015 berjalan aman dan tertib sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Strategi, Komunikasi, Politik, Pemilihan Umum, Dukungan Publik

A. Pendahuluan

Kronologis eksistensi negara Indonesia merupakan salah satu negara penganut demokrasi, sehingga dalam melahirkan pemimpin, dukungan publik menjadi faktor penting untuk menentukan paslon pemimpin.

Proses awal penjaringan pasangan calon (paslon), masa kampanye, dan pemilihan hingga penghitungan suara penentuan kemenangan diperlukan berbagai strategi komunikasi politik. Sebagaimana yang diungkapkan McNair bahwa komunikasi

politik tidak terlepas dari alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai kekuasaan, ekonomi, petugas pemberi kekuasaan, pembuat undang-undang dan aturan-aturan, serta sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran.

Komunikasi politik tidak hanya retorika, tetapi juga mencakup simbol-simbol, bahasa tubuh, gambar, tindakan politik, seperti protes, boikot, dan unjuk rasa. Komunikasi politik merupakan suatu proses yang memiliki implikasi terhadap aktivitas politik, pesan yang bermuatan politik.

Komunikasi politik dalam pemilihan umum bertujuan melahirkan pemimpin, untuk menyusun tatakehidupan lebih baik yang dijiwai oleh semangat kemerdekaan. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No.15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum, tujuan pemilihan umum “Dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat serta cita-cita Revolusi Kemerdekaan RI Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana dalam Pancasila dan UUD 1945, maka penyusunan tatakehidupan itu harus dilakukan dengan jalan Pemilihan Umum. Pemilihan umum diadakan tidak hanya sekedar memilih wakil-wakil rakyat, presiden, kepala daerah, tetapi juga melanjutkan perjuangan, tetap tegaknya Pancasila dan UUD 1945. Pilkada serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dan Putusan MK No.100/PUU-XI-II/2015. Menurut Undang-Undang tersebut, Pilkada diselenggarakan secara serentak tahun 2015, 2017, dan tahun 2018 (MZ Al-Faqih, dalam Pikiran Rakyat (15/10/2015, hlm.26).

Upaya memenuhi hak masyarakat upaya

memenuhi hak masyarakat dan pemilihan atas informasi penyelenggaraan pilkada, KPU telah mengeluarkan peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan Pelayanan Informasi Pemilihan Umum yang memudahkan publik untuk menilai apakah KPU sebagai penyelenggara pilkada serentak telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi dan menjamin masyarakat pemilih tahu setiap proses penyelenggaraan pilkada serentak. Berbagai peraturan, perundang-undangan terkait dengan pilkada, menjadi dasar dalam menentukan berbagai strategi komunikasi politik dalam upaya menjangkau dukungan publik. Baik komunikasi politik yang bersifat vertikal, horizontal maupun diagonal.

Eksistensi komunikasi terdapat dua sistem dasar, yaitu sistem internal dan sistem eksternal (Mulyana, 2007: 116). Sistem internal adalah seluruh sistem nilai yang dibawah individu ketika ia berpartisipasi dalam komunikasi, yang ia serap selama sosialisasinya dalam berbagai lingkungan sosialnya. Sistem eksternal adalah unsur-unsur dalam lingkungan di luar individu. Pawito (2007:10) komunikasi politik dalam kelompok upaya pengambilan keputusan sebagai proses dimana individu-individu anggota saling berupaya mencapai kebersamaan (*convergence*), kesepakatan (*agreement*) dan menstruktur sistem sosial mereka.

Masyarakat Indonesia masih memiliki kesadaran yang tinggi dalam hal pemilu, terbukti dengan semaraknya setiap penyelenggaraan pemilu. Serangkaian peristiwa, termasuk saat-saat kampanye adalah saat-saat yang paling menentukan sekalipun menegangkan. Kandidat benar-benar diuji kemampuannya dari mulai penampilannya, gaya bicaranya, materi program sampai pelaksanaannya

apabila terpilih nanti. Atau dengan kata lain terkait dengan visi, misi, program dari masing-masing kandidat. Kandidat yang tidak mampu meyakinkan massa pemilih dan para pendukungnya, atau kandidat yang dituduh terkena skandal atau kasus moral, adakalanya memiliki kecenderungan reputasinya menurun. Masyarakat Indonesia cukup kritis dan faham terhadap kondisi kandidat. Jadi tidak heran jika pilihan mereka bisa berpindah kepada kandidat lain, yang dianggap programnya lebih pro mereka. Sealin itu juga kecurangan yang masif, terutama menjelang pencoblosan, seperti: politik uang (*money politic*), kampanye hitam (*black campaign*), manipulasi data, dan kecurangan-kecurangan lainnya.

Strategi komunikasi politik senatiasa dilakukan, tidak hanya memperhatikan faktor sumber daya yang dimiliki, tetapi juga nilai-nilai yang harus dianut oleh peserta pilkada selama proses pilkada berlangsung. Masyarakat Indonesia cukup kritis dan faham terhadap kondisi kandidat. Jadi tidak heran jika pilihan mereka bisa berpindah kepada kandidat lain, yang dianggap programnya lebih pro mereka. Bagaimana strategi komunikasi politik para pasangan calon (paslon) kepala daerah pada pilkada serentak 2015 di Propinsi Jawa Barat dalam upaya menjaring dukungan publik?

B. Rumusan Masalah

“Bagaimana Strategi Komunikasi Politik Paslon (pasangan calon) dalam Pilkada Serentak 2015 Kepala Daerah dalam Upaya Menjaring Dukungan Publik Di Propinsi Jawa Barat?”. Untuk lebih mengarahkan penelitian yang dilakukan maka dari rumusan masalah tersebut

dijabarkan beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perencanaan yang dilakukan para paslon kepala daerah di Jawa Barat yang bisa dijadikan sebagai modal strategi komunikasi politik pilkada serentak 2015 dalam upaya menjaring dukungan publik?
2. Bagaimana hasil dari perolehan suara dukungan sebagai dasar menentukan kemenangan pilkada serentak 2015 dari strategi komunikasi politik yang dilakukan para paslon dalam upaya menjaring dukungan publik?

Tujuan penelitian ini yaitu untuk: 1). Mengetahui proses perencanaan yang dilakukan para paslon kepala daerah di Jawa Barat yang bisa dijadikan sebagai modal strategi komunikasi politik pilkada serentak 2015 dalam upaya menjaring dukungan publik. 2). Mengetahui hasil dari perolehan suara dukungan sebagai dasar menentukan kemenangan pilkada serentak 2015 dari strategi komunikasi politik yang dilakukan para paslon dalam upaya menjaring dukungan publik.

C. Tinjauan Pustaka

Menurut Hafied Cangara (2009), Reformasi yang membawa perubahan baru dalam politik Indonesia menjadi makin dinamis. Pemilihan langsung untuk jabatan eksekutif dan legislatif melahirkan kreasi komunikasi para kandidat untuk memikat, menggalang, dan menarik pemilih. Kampanye politik sebagai bentuk aktivitas komunikasi politik jadi marak untuk membentuk opini publik. Saluran komunikasi politik jadi marak untuk membentuk opini publik. Saluran-saluran komunikasi seperti media cetak dan

elektronik pun digunakan. Para kandidat berbenah diri tampil dalam sosok yang dekat dengan rakyat, menawarkan program, menunjukkan karya nyata, dan menjanjikan perubahan. Dinamika politik yang meriah dengan segala bentuk strategi, selain menjadi tontonan pesta demokrasi, juga menarik sebagai kajian ilmiah dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan dari dimensi komunikasi, politik, sosiologi, ekonomi, hukum, budaya dan psikologi.

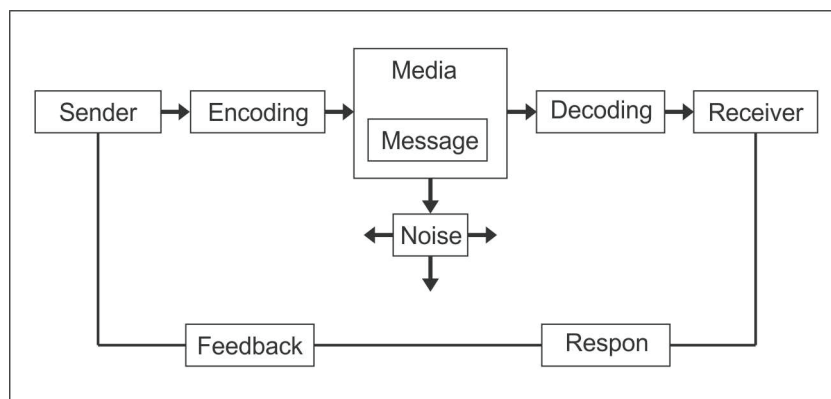
Deddy Mulyana (2013) mengatakan, fenomena politisi dan birokrat dalam berkomunikasi dan bagaimana mereka mengemas strategi untuk mencapai tujuan berpolitik yang sering mengabaikan etika komunikasi. Komunikasi adalah energi bagi tumbuhnya kebaikan dan kemaslahatan dalam dunia politik dan birokrasi. Komunikasi mendorong dialog yang kritis dan mencerdaskan. Komunikasi juga menjembatani kehendak rakyat dan apa yang sebaiknya politisi dan birokrat lakukan untuk meningkatkan kepekaan dan pemahaman akan paradigma dan praktik komunikasi yang sejalan dengan demokrasi dan era baru yang sarat perubahan dan tantangan.

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Strategi berfungsi sebagai peta jalan yang harus mampu menunjukkan taktik operasionalnya. Begitu juga dengan perhelatan politik yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan tidak terlepas dari strategi komunikasi politik. Pace, Peterson, dan Dallas, dalam bukunya, "*Techniques for Effective Communication*" menyatakan, tujuan sentral kegiatan komunikasi terdiri atas tiga tujuan utama yaitu: *to secure*

understanding, to establish acceptance, to motivate action.

Harold Laswell, mendefinisikan komunikasi dengan menanyakan "Siapa", mengatakan "apa", kepada siapa, dan apa akibatnya. Terkait dengan politik, Benyamin Disraeli mengatakan bahwa, "*politics are the possession and distribution of power*" (Cummings, 1985). Sebuah pengambilan keputusan dari berbagai alternatif yang mungkin bisa saja terjadi harus mendapatkan prioritas daripada kepentingan yang lain. Meadow (Nimmo, 2004) memberikan definisi bahwa "*political communication refers to any exchange of symbols or message that to a significant extent have been shaped by or have consequences for political system*".

Komunikasi politik tidak hanya retorika, tetapi mencakup simbol-simbol bahasa, seperti bahasa tubuh serta tindakan-tindakan politik, seperti boikot, protes, dan unjuk rasa. Komunikasi politik merupakan suatu proses. Hafid Cangara, mengatakan bahwa komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik. Faktor ini pula yang membedakan dengan disiplin komunikasi lainnya seperti komunikasi antar budaya, komunikasi organisasi, komunikasi bisnis dan komunikasi lainnya.



Gambar 1: Model Komunikasi

Model komunikasi diatas menjelaskan faktor-faktor kunci dalam komunikasi menterlbatkan berbagai unsur komunikasi. Komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran itu bisa merupakan gagasan, informasi, opini yang muncul dalam benaknya. Komunikasi akan berhasil apabila pikiran disampaikan dengan menggunakan perasaan yang disadari. Sebaliknya komunikasi bisa gagal jika sewaktu menyampaikan pikiran, perasaan tidak terkontrol.

Strategi komunikasi politik bisa bersifat makro maupun mikro. Pada komunikasi yang bersifat makro, peran negara, pemerintah baik itu dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan terlibat dalam proses komunikasi politik. Target sasaran dalam komunikasi makro, menyangkut khalayak sasaran (*target audience*) yang dalam strategi komunikasi makro perlu dibagi-bagi lagi menjadi kelompok sasaran (*target groups*). Peliknya masalah *target groups*, perlu adanya pesan-pesan yang berorientasi kepada kebutuhan *target audience* dengan pesan yang seba konkrit mengenai kebutuhan dan keinginan pribadi (*individual wants and needs*).

Seseorang yang menyampaikan pesan, ikut menentukan berhasil tidaknya komunikasipolitik. Faktor *source credibility* komunikator memegang peranan yang sangat penting. Istilah kredibilitas ini adalah istilah yang menunjukkan nilai terpadu dari kemampuan, keahlian dan kelayakan dipercaya (*a term denoting the resultant value expertness and trust worthiness*). Seseorang komunikator memiliki kredibilitas disebabkan oleh etos pada dirinya, yaitu apa yang dikatakan Aristoteles dan hingga kini masih

dijadikan pedoman adalah *good sense, good moral, and good character*, yang kemudian oleh para cendikiawan modern diformulasikan menjadi itikad baik (*good intentions*), kelayakan untuk dipercaya (*trustworthiness*), serta kecakapan atau keahlian (*competence or experinness*).

Komunikasi politik merupakan proses yang rumit. Proses penyusunan strategi komunikasi politik, diperlukan suatu pemikiran dengan memperhatikan komponen-komponen komunikasi politik dan faktor-faktor pendukung dan serta penghambat. Akan lebih baik bahwa dalam strategi tersebut memperhatikan komponen-komponen komunikasi dan faktor-faktor pendukung serta penghambat-penghambat komunikasi politik serta berbagai hambatan komunikasi politik, baik yang berasal dari lawan-lawan politik, maupun komponen-kompnen komunikasi itu sendiri, yaitu: komunikasi sebagai sasaran komunikasi politik, pemilihan media, pengkajian tujuan pesan komunikasi politik, serta peranan komunikator dalam komunikasi. Mengenali sasaran, baik itu menyangkut kerangka referensi maupun situasi dan kondisi yang bisa menjadi peluang atau sebaliknya bisa menjadi penghambat komunikasi politik.

Masa kampanye peran media juga sangat penting untuk memberikan berbagai informasi yang menguntungkan bagi paslon, baik media massa maupun nirmasa, baik cetak maupun elektronik. Pesan komunikasi politik memiliki tujuan tertentu. Ini menentukan teknik yang harus diambil, apakah teknik informasi, persuasi, atau teknik instruksi. Apapun tekniknya, pesan komunikasi harus bisa dimengerti publik. Pesan komunikasi (*message*) terdiri atas isi pesan (*the content of the message*) dan lambang (*symbols*).

Pesan merupakan lambang-lambang bermakna yang bisa dipergunakan untuk menyampaikan isi pesan komunikasi politik, biasanya dalam bentuk lambang bahasa, gambar, warna, kial (*gesture*) dan lain sebagainya.

Secara makro, sistem komunikasi menyangkut sistem pemerintah, secara mikro menyangkut operasional komunikasi. Dalam hubungannya dengan sistem komunikasi, bila ditinjau secara makro vertikal, jelas bahwa di satu pihak sistem komunikasi itu dipengaruhi oleh sistem yang lain.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang umumnya bersifat kualitatif. Subjek penelitian dengan menetapkan informan. Informan menurut Fontana dan Frey (1994) adalah seseorang yang bertindak sebagai pembantu peneliti, tetapi ia berasal dari atau menjadi anggota yang diteliti. Tugas informan adalah sebagai petunjuk jalan (*guide*) dan penterjemah kebiasaan-kebiasaan yang bersifat kultural serta istilah-istilah khas atau ungkapan-ungkapan yang dikembangkan secara khusus oleh anggota masyarakat (Bungin, 2003: 92). Informan dalam penelitian kualitatif terdiri atas

informan pangkal dan informan kunci (*key informan*) (Koentjaraningrat, 1991: 130). Penetapan informan dilakukan berdasarkan kepentingan peneliti yang dipilih secara purposif.

E. Hasil Penelitian

Tahun 2015 adalah Tahun Pertama dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di seluruh Indonesia. Termasuk di Propinsi Jawa Barat, yang diikuti oleh 8 (delapan) Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran.

Pilkada serentak diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Pemerintah (baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Peserta Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) yaitu Pasangan Calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati, baik yang diusung oleh partai politik tunggal dan/atau partai politik gabungan/koalisi, serta pasangan calon (paslon) perseorangan, pemilih atau setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih, dan juga media massa, sebagai media informasi, edukasi, dan klarifikasi.

Tabel: 1

Tahapan Proses Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015

No	Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	Perencanaan Program dan Anggaran	18 Feb 2015	30 April 2015
2	Penyusunan Peraturan	23 Feb 2015	30 April 2015
3.	Sosialisasi/Penyusunan/Bimbingan Teknis	16 April 2015	8 Desember 2015
4.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS	19 April 2015	18 Mei 2015
5.	Pemantauan Pemilihan	1 Mei 2015	2 Nopember 2015
	Pendaftaran Pemantau Pilih		
6.	Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)		
	a. Penerimaan DPT	3 Juni 2015	3 Juni 2015
	b. Analisis DP4	4 Juni 2015	10 Juni 2015
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir	11 Juni 2015	19 Juni 2015
	d. Penyampaian hasil analisa DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Propinsi /KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten Kota	20 Juni 2015	23 Juni 2015
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	24 Juni 2015	24 Juni 2015
7.	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU /KIP Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	24 Juni 2015	24 Juni 2015
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pengocokan dan Penelitian	15 Juli 2015	29 Agustus 2015
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil	20 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	3) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/ kelurahan dan penyampaian-nya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan	30 Agustus 2015	29 Agustus 2015
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten /kota untuk untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih	1 September 2015	2 September 2015
	6) Sementara (DPS)	2 September 2015	3 September 2015
	7) Rekapitulasi Daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat propinsi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih	3 September 2015	9 September 2015
	8) Sementara	10 September 2015	19 September 2015
	9) Perbaikan DPS	20 September 2015	25 September 2015
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa /kelurahan dan Penyampiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	26 September 2015	28 September 2015
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan	29 September 2015	30 September 2015
	12) Daftar pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	1 Oktober 2015	2 Oktober 2015
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	3 Oktober 2015	12 Oktober 2015
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	12 Oktober 2015	9 Desember 2015
	d) Rekapitulasi DPT tingkat Propinsi	3 Oktober 2015	4 Oktober 2015
	13) Daftar Pemilih Tetap Tambahan DPTb-I		
	a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	13 Oktober 2015	20 Oktober 2015
	b) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan dan penyampiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	21 Oktober 2015	23 Oktober 2015

	c) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	24 Oktober 2015	26 Oktober 2015
	d) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kabupaten/kota	27 Oktober 2015	28 Oktober 2015
	e) Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	29 Oktober 2015	7 Nopember 2015
	f) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Propinsi	29 Oktober 2015	30 Oktober 2015
	g) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	7 Nopember 2015	9 Desember 2015
	PENYELENGGARAAN		
1.	Syarat Dukungan Calon Perseorangan		
	a. Penerimaan data Agrerat Kependudukan perkecamatan (DAK2) dari Pemerintah daerah	17 April 2015	17 April 2015
	b. Pengumuman Penyerahan syarat dukungan	24 Mei 2015	7 Juni 2015
	c. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur		
	1) Penyerahan syarat dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Propinsi/KIP Aceh	8 Juni 2015	12 Juni 2015
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan	8 Juni 2015	15 Juni 2015
	3) Analisis dukungan ganda	8 Juni 2015	15 Juni 2015
	d. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU /KIP/Kabupaten/ Kota	16 Juni 2015	18 Juni 2015
	e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati /Calon Walikota dan Wakil Walikota		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati /Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/ KIP Keudayaan/Kota	11 Juni 2015	15 Juni 2015
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan	11 Juni 2015	18 Juni 2015
	3) Analisis dukungan agenda	11 Juni 2015	18 Juni 2015
	f. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati/Walikota	19 Juni 2015	22 Juni 2015
	g. Penelitian administrasi dan dan factual di tingkat desakelurahan	23 Juni 2015	6 Juli 2015
	h. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	7 Juli 2015	13 Juli 2015
	i. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	14 Juli 2015	19 Juli 2015
	j. Rekapitulasi di tingkat provinsi	22 Juli 2015	24 Juli 2015
2	Pendaftaran Pasangan Calon		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 Juli 2015	25 Juli 2015
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	26 Juli 2015	28 Juli 2015
	c. Pemeriksaan Kesehatan	26 Juli 2015	1 Agustus 2015
	d. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	1 Agustus 2015	2 Agustus 2015
	e. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	28 Juli 2015	3 Agustus 2015
	f. Pemberitahuan hasil penelitian	3 Agustus 2015	4 Agustus 2015
	g. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	1) Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
	2) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
	3) Perbaikan syarat Pasangan Calon Partai Politik /gabungan Partai Politik dan Perseorangan	4 Agustus 2015	7 Agustus 2015
	h. Penelitian hasil perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/ gabungan Partai Politik	8 Agustus 2015	14 Agustus 2015

	2) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota /Wakil Walikota oleh KPU /KIP Kabupaten/Kota:		
	a. Penelitian jumlah syarat dukungan pasangan	4 Agustus 2015	9 Agustus 2015
	b. Analisis Dukungan	4 Agustus 2015	9 Agustus 2015
	c. Penyampaian Hasil Analisis dukungan ganda	10 Agustus 2015	11 Agustus 2015
	d. Penelitian administrasi data factual di tingkat desa /kelurahan	12 Agustus 2015	16 Agustus 2015
	e. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	18 Agustus 2015	21 Agustus 2015
	f. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota	20 Agustus 2015	23 Agustus 2015
	g. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi	23 Agustus 2015	23 Agustus 2015
	3) Penelitian perbaikan syarat calon		
	i. Penetapan Pasangan Calon	24 Agustus 2015	24 Agustus 2015
	j. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	25 Agustus 2015	26 Agustus 2015
3.	Sengketa Tun Pemilihan		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Propinsi/ Panwas Kabupaten/Kota	25 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	b. Perbaikan Permohonan sengketa	25 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan		
	25 Agustus 2015	26 Agustus 2015	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara	11 September 2015	13 September 2015
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	14 September 2015	16 September 2015
	f. Pengadlan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) memeriksa dan memutus gugatan	17 September 2015	08 Oktober 2015
	g. KPU Propinsi/KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti keputusan PTTUN	9 Oktober 2015	11 Oktober 2015
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	08 Oktober 2015	16 Oktober 2015
	i. MA Memeriksa dan memutuskan perkara kasasi	16 Oktober 2015	14 Oktober 2015
	j. KPU Propinsi /KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten /Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	15 Nopember 2015	17 Nopember 2015
4.	Kampanye		
	a. Kampanye	27 Agustus 2015	5 Desember 2015
	b. Debat public/terbuka antar Pasangan Calon	27 Agustus 2015	5 Desember 2015
	c. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2015	8 Desember 2015
5.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye	26 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	b. Pengumuman penerimaan laporan awal dan kampanye	27 Agustus 2015	27 Agustus 2015
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	16 Oktober 2015	16 Oktober 2015
	d. Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	17 Oktober 2015	17 Oktober 2015
	e. Penyerahan laoporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2015	6 Desember 2015
	f. Penyerahan LPPDK Kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2015	8 Desember 2015
	g. Audit LPPDK	7 Desember 2015	22 Desember 2015
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK Kepada KPU Propinsi /KIP Aceh atau KPU /KIP Kabupaten/Kota	23 Desember 2015	23 Desember 2015
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	26 Desember 2015	26 Desember 2015
	j. Pengumuman hasil audit	24 Desember 2015	26 Desember 2015
6.	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara		

	a. Proses Pengadaan Perlengkapan	10 September 2015	16 Nopember 2015
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	5 Oktober 2015	8 Desember 2015
7	Pemungutan dan Penghitungan		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Desember 2015	8 Desember 2015
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2015	9 Desember 2015
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2015	15 Desember 2015
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	9 Desember 2015	9 Desember 2015
8	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	9 Desember 2015	10 Desember 2015
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU/KIP Kabupaten/Kota	10 Desember 2015	16 Desember 2015
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecaatan	11 Desember 2015	17 Desember 2015
	d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten / kota, penetapan hasil rekapitulasi dan penyampaian ke KPU Propinsi/KIP Aceh	16 Desember 2015	18 Desember 2015
	e. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota	17 Desember 2015	23 Desember 2015
	f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi dan penetapannya	18 Desember 2015	18 Desember 2015
	g. Pengumuman hasil rekapitulasi	19 Desember 2015	27 Desember 2015
9.	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tidak ada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan		
	a. Calon Bupati dan wakil Bupati Wali Kota/Wakil Walikota	21 Desember 2015	22 Desember 2015
	b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	22 Desember 2015	23 Desember 2015
10	Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan		
	a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota		
	1) Pengajuan Permohonan	18 Desember 2015	21 Desember 2015
	2) Perbaikan Permohonan	21 Desember 2015	24 Desember 2015
	3) Verifikasi berkas permohonan pemohon	24 Desember 2015	27 Desember 2015
	4) Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Desember 2015	12 Desember 2015
	b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur		
	1) Pengajuan Permohonan	19 Desember 2015	23 Desember 2015
	2) Perbaikan Permohonan	22 Desember 2015	25 Desember 2015
	3) Verifikasi berkas permohonan pemohon	25 Desember 2015	28 Desember 2015
	4) Penyelesaian sengketa dan putusan	29 Desember 2015	13 Desember 2015
11.	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	12 Februari 2016	13 Maret 2016
	b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	13 Februari 2016	14 Maret 2016
12.	Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih		
	a. Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih		
	1) Tidak ada permohonan PHP	23 Desember 2015	29 Desember 2015
	2) Terdapat Permohonan PHP	13 Februari	14 Maret 2015
	b. Gubernur dan wakil gubernur		
	1) Tidak ada permohonan PHP	24 Desember 2015	29 Desember 2015
	2) Terdapat Permohonan PHP	14 Februari 2015	15 Maret 2015

13.	Evaluasi dan Pelaporan		
	a. Tidak ada permohonan PHP	31 Desember 2016	1 Februari 2016
	b. Terdapat permohonan PHP	16 Maret 2015	14 April 2016

Tabel 2:
Daftar Alamat Kantor dan Nama Ketua KPU Kabupaten/Kota Proponsi Jawa Barat
Pada Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Nama Ketua KPU	Alamat	Telp/Fax
1	KPU Kabupaten Sukabumi	Dede Haryadi, S.Pd	Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat No.822 Sukabumi 43132	0266-222519
2	KPU Kabupaten Cianjur	Anggy Shoffia W, SH.,MH	Jl. Ir.H.Juanda No. 28B Kabupaten Cianjur 43215	0263-281626
3	KPU Kabupaten Bandung	Atip Tartiana, S.IP	Jl. Raya Taman Kopo Indah I Blok F No.5 Margahayu 40191	0260-418084
4	KPU Kabupaten Tasikmalaya	H.Deden Nurul Hidayat, ST,.MM	Jl. Soekarno-Hatta No.416 A Singaparna Kabupaten 46416 Tasikmalaya	0265-549838
5	KPU Kabupaten Indramayu	Mohammad Hadi Ramdhan, S.Ag	Jl. Soekarno-Hatta No.1 Pangkan- dangan Indramayu	0234-275482
6	KPU Kabupaten Karawang	Ir.Risza Affiat	Jl. Pangkal Pejuang By Pass Tan- jung Pura Karawang	0267-8453115
7	KPU Kabupaten Depok	Titik Nurhayati	Jl. Kartini No.19 Depok 16411	021-7773605
8	KPU Kabupaten Pangandaran	Kikim Tarkim, S.Ag.,M.Si Tugiman	Jl.Parapat Parigi No.710 Parigi	081318421706

Tabel 3:
Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati dan Partai Politik Pengusung Pilkada Serentak di
Propinsi Jawa Barat Tahun 2015

No	Daerah Pemili- han	Nama Paslon	Partai Pengusung
01	Kabupaten Bandung	Sofyan Yahya - Agus Yasmin	PAN & HANURA (10 Kursi)
		Deki Wajar – Dony Mulyana Kurnia	PDIP& DEMOKRAT (14 Kursi)
02	Kabupaten Cianjur	Irvan Rivano Muchtar - Herman Suherman	GOLKAR, PBB dan PKB (14 Kursi)
		dr. H. Suranto- Aldwin Rahadian	PDIP, HANURA, PAN, NASDEM, GERINDRA, dan PKS (23 Kursi)
03	Kabupaten Depok	Dimas Oky Nugroho - Babai Suhaimi	PDIP, NASDEM, PKB, dan PAN (19 Kursi)
		Mohammad Idris - Pradi Supriana	PKS dan GERINDRA (15 Kursi)
04	Kabupaten Idramayu	Anna Sophanah - Supendi	GERINDRA, PKS, DEMOKRAT (12 Kursi)
		Toto Sucartono - Rasta Wiguna	PDIP, PKB, NASDEM (17 Kursi)
05	Kabupaten Karawang	Akhmad Marjuki - Dedy S Gumelar	PDIP, PBB, dan HANURA (14 Kursi)
		Cellica Nurrachadiana - Ahmad Zamkhsyari	DEMOKRAT, PKB, PKS, PAN, dan PPP (14 Kursi)
		Saan Mustofa - Iman Sumantri	GOLKAR GERINDRA, dan NASDEM (17 Kursi)
06	Kabupaten Sukabumi	Totong Supaman - A.Murthado Tadrinhan	PKS dan HANURA (10 Kursi)
		Marwan Hamami - Adjo Sardjono	GOLKAR, DEMOKRAT, GERINDRA, PPP, dan PKB (25 Kursi)
		Akhmad Jajuli - Iman Adinugraha	PDIP, PAN, dan NASDEM (13 Kursi)
07	Kabupaten Tasikmalaya	Uu Ruzhanul Ulum- Ade Sugianto	PDIP, GOLKAR, PAN, PKS (23 kursi)
08	Kabupaten Pangandaran	Ino Darsono - Erwin Thamrin	PAN (7 Kursi)
		Azizah Talita Dewi - Cucu Sulaksana	PKB, NASDEM dan GERINDRA (7 Kursi)
		H. Jeje Wiradinata - Adang Hadari	PDIP, GOLKAR, PKS, dan DEMOKRAT (18 Kursi)

Tabel 4:
Daftar Jumlah Pemilih di Masing-Masing
Kabupaten/Kota dalam Pilkada Serentak
Propinsi Jawa Barat pada Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih
1	Kabupaten Sukabumi	1.832.842
2	Kabupaten Cianjur	1.702.365
3	Kabupaten Bandung	2.531.640
4	Kabupaten Tasikmalaya	1.280.114
5	Kabupaten Indramayu	1.341.665
6	Kabupaten Karawang	1.473.597
7	Kabupaten Depok	1.203.134
8	Kabupaten Pangandaran	303.140
	Total Pemilih	11.668.497

Tabel: 5
Besarnya Dana yang dibutuhkan pada
penyelenggaraan masing-masing Kabupaten/
Kota dalam Pilkada Serentak di Propinsi Jawa
Barat Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Besarnya Biaya yang Dibutuhkan (Rp)
1	Kabupaten Sukabumi	48.400.000.000
2	Kabupaten Cianjur	50.088.000.000
3	Kabupaten Bandung	57.993.554.376
4	Kabupaten Tasikmalaya	40.000.000.000
5	Kabupaten Indramayu	48.478.366.750
6	Kabupaten Karawang	59.597.254.200
7	Kabupaten Depok	49.283.950.000
8	Kabupaten Pangandaran	15.985.284.731
	Total Dana yang dibutuhkan	369.826.410.057

Tabel 6:
Daftar Jumlah Pemilih di Masing-Masing
Kabupaten/Kota dalam Pilkada Serentak Propinsi
Jawa Barat Pada Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih
1	Kabupaten Sukabumi	1.832.842
2	Kabupaten Cianjur	1.702.365
3	Kabupaten Bandung	2.531.640
4	Kabupaten Tasikmalaya	1.280.114
5	Kabupaten Indramayu	1.341.665
6	Kabupaten Karawang	1.473.597
7	Kabupaten Depok	1.203.134
8	Kabupaten Pangandaran	303.140
	Total Pemilih	11.668.497

Pasangan calon (paslon) kepala daerah yang mendapatkan dukungan terbanyak merekalah yang menjadi pemenang. Kabupaten Bandung dimenangkan oleh pasangan calon H. Dadang M. Naser dan Gun-Gun Gunawan; Kota Depok dimenangkan oleh pasangan calon KH. Dr. Mohammad Idris, MA dan Pradi Supriana; Kabupaten Karawang dimenangkan oleh pasangan calon dr. Cellica Nurrachman dan H. Ahmad Zamkhyasi, S.Ag; Kabupaten Tasikmalaya dimenangkan oleh pasangan calon UU Ruzhanul Ulum, SE dan H. Ade Sugianto, S.IP; Kabupaten Pangandaran dimenangkan oleh paslon H. Jeje Wiradinata dan H. Adang Hadari.

E. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Proses perencanaan yang dilakukan para paslon kepala daerah di Jawa Barat yang bisa dijadikan sebagai model strategi komunikasi politik pilkada serentak 2015 dalam upaya menjaring dukungan publik. Proses dan pelaksanaan Pilkada serentak di Propinsi Jawa Barat berjalan aman dan tertib sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil Perolehan suara dukungan terbanyak sebagai dasar menentukan kemenangan pilkada serentak 2015 dari strategi komunikasi politik yang dilakukan para paslon dalam upaya menjaring dukungan publik untuk memilihnya.

Saran

1. Perencanaan dan persiapan pilkada serentak tahun 2015 terbilang pendek, kurang dari 1 (satu) tahun. Padahal praktik pilkada dimanapun, idealnya perencanaan dan persiapan pilkada setidaknya 2 (dua) tahun. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pilkada kali ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk kegiatan pemilihan dimasa mendatang, dengan memperbaiki dan menyempurnakan berbagai kekuarangan dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2015.
2. Regulasi penyelenggaraan pemilihan hendaknya diupayakan dibuat jauh-jauh hari sebelum tahapan dimulai. Tujuannya agar KPU kabupaten/kota dapat mempelajari aturan tersebut untuk menghindari adanya kesalahan tafsir terhadap peraturan KPU.

E. Daftar Pustaka

- Abrar, Ana Nadhya. 2003. Teknologi Komunikasi. Perspektif Ilmu Komunikasi. Cetakan I. Yogyakarta: LESFI.
- Alma, Buchari; Priansa, Donni Juni. 2009. Manajemen Bisnis Syari'ah. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta.
- Azra, Azyumardi. 1999. Konteks Berteologi di Indonesia, Jakarta: Paramadina.
- Cangara, Hafied. 2000. Pengantar Ilmu Komunikasi. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Dewi, Sutrisna. 2007. Komunikasi Bisnis. Edisi I. Yogyakarta: Andi Offset.
- Effendi, Onong Uchyana. 1993. Ilmu, Teori & Filsafat Komunikasi. Cetakan ke I. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1998. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik. Cetakan Kesebelas. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Finosa, Lamuddin. 1982. Aneka Surat Sekretaris & Bisnis Indonesia. Edisi Revisi 4. Jakarta: Diksi Insan Mulia.
- Gunara, Thorik. 2009. Komunikasi Rasulullah. Indahnya Berkomunikasi ala Rasulullah. Cetakan Pertama. Bandung. Simbiosis Rekatama Media.
- Iriantara, Yosol. 2005. Media Relations. Konsep, Pendekatan, dan Praktik. Cetakan Pertama. Bandung. Simbiosis Rekatama Media.
- ; Subarna; Rochman. 2008. Komunikasi Bisnis. Edisi ke-2. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Johannesen, Richard L. 1996. Etika Komunikasi. Terjemahan. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lewis, Richard D. 2005. Komunikasi Bisnis Lintas Budaya. Terjemahan. Cetakan kedua. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muslich. 2007. Bisnis Syari'ah. Perspektif Mu'amalah dan Manajemen. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Nuridin, dkk. 1993. Moral dan Kognisi Islam. Edisi ke-1. Bandung: Alfabeta.
- Ruslan, Rosady. 2003. Manajemen Public Relations Media Komunikasi. Konsep dan Teori. Cetakan Kelima. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Priatna, Soeganda & Ardianto, Elvinaro. 2009. Komunikasi Bisnis. Cetakan pertama. Bandung: Widya Pandjadjaran.
- Saefullah, Ujang. 2007. Kapita Selekta Komunikasi: Pendekatan Budaya dan Agama. Cetakan pertama. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Saladin. Djaslim. 2003. Intisari Pemasaran & Unsur-Unsur Pemasaran. Cetakan

- Ketiga. Bandung: CV Linda Karya.
- Sudarman, Paryati. 2008. Menulis di Media Massa. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syarifuddin, Amir. 2001. Ushul Fiqh, jilid 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Susanto, Astrid S. 1995. Filsafat Komunikasi. Cetakan kelima. Bandung: Binacipta.
- Suyanto, M. 2005. Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis. Edisi 1. Yogyakarta: Andi.